

PENGEMBANGAN WILAYAH MARITIM UNTUK SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Nugroho Hari Purnomo

Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Kampus Ketintang Surabaya; email : nugrix@gmail.com

***Abstrak** : Tulisan ini bertujuan menyoroti potensi sumberdaya wilayah maritim sebagai sasaran SDGs, guna memperkuat komitmen semua pihak untuk memperhatikan wilayah maritim. Wilayah maritim yang luas tetapi minim perhatian pembangunan, menjadikan wilayah ini sangat tertinggal. Wilayah maritim memiliki karakteristik fisik dan budaya, sosial, ekonomi yang unik dibandingkan wilayah daratan. Diperlukan kajian objektif dan komunikator yang menjembatani pengetahuan modern dan pengetahuan lokal yang mampu menggali potensi wilayah secara komperhensif. Pada perencanaan wilayah level mikro yaitu desa atau kecamatan, informasi objektif karakteristik fisik maritim, budaya sosial ekonomi spesifik masyarakat, dan struktur demografi yang mendukung keterampilan teknologi untuk pembangkit perekonomian sangat diperlukan. Perencanaan terpadu yang berjenjang untuk pengembangan wilayah maritim mutlak untuk dilakukan*

***Kata kunci** : Pengembangan, wilayah, maritim*

PENDAHULUAN

Kardono, *et al.*, (eds) (2015) menyatakan bahwa Indonesia memiliki luas daratan 1.890.739 km². Sementara luas perairan yang terbagi dalam perairan kepulauan, teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif adalah 9.060.014 km². Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah lautan Indonesia jauh lebih luas dari wilayah daratannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, adalah sangat logis apabila orientasi Bangsa Indonesia segera memperkuat basis kemaritiman.

Pembangunan bangsa diantaranya dengan pengsinergian skema SDGs (*Sustainable Development Goals*) dalam pembangunan nasional memiliki tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara merata. Wilayah maritim yaitu kepesisiran dan pulau kecil seharusnya memperoleh perhatian intensif dengan porsi yang lebih besar dalam pelaksanaan SDGs. Wilayah pesisir dan pulau kecil selama ini terkenal dengan tingkat kesejahteraan yang sangat minim, rendahnya layanan kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya komitmen pemerintah dalam

pembangunan ekonomi, menjadikan wilayah tersebut merukan wilayah yang terbelakang yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesejahteraan yang rendah (Kamiso, 2000). Tulisan ini menyoroti potensi sumberdaya maritim sebagai sasaran SDGs, guna memperkuat komitmen semua pihak untuk memperhatikan wilayah maritim.

PERSOALAN MASYARAKAT MARITIM DALAM SDGs

Di Indonesia ada sebanyak 12.827 desa yang terletak di tepi laut (Kardono, *et al.*, (eds), 2015). Apabila di rata-rata, sepanjang garis pantai Indonesia yang panjangnya 99.093 km, maka kepadatan setiap 100 km garis pantai terdapat 13 desa. Di desa pantai Jawa dan Bali tingkat kepadatannya 22 desa/100 km. Sementara di Kalimantan dan Papua kepadatannya 6 desa/100 km. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang tinggal di desa pantai adalah 11,25% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan komposisi demografi tersebut, yaitu persentase jumlah penduduk yang rendah secara nasional serta sebaran yang tidak merata, kemungkinan menjadi alasan pembangunan masyarakat pesisir cenderung terabaikan.

Masyarakat pesisir juga memiliki karakteristik budaya, sosial, ekonomi yang unik dibandingkan masyarakat daratan. Misalnya adalah Suku Bajo, sebagai salah satu masyarakat maritim, memilih bermukim di perairan pesisir dengan kehidupan yang sepenuhnya menggantungkan kehidupan bersumber dari sumberdaya perairan. Aspek sosial sebagai pemukim di perairan akan sulit mengikuti perkembangan pembangunan. Masyarakat akan sulit dalam mengakses fasilitas kesehatan maupun pendidikan yang di bangun di daratan. Sementara pemanfaatan ekonomi sumberdaya pesisir hanya sekedar ambil dan makan. Rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan mengakibatkan terbatasnya inovasi yang mendukung perkembangan perekonomian.

Sampai saat ini kajian kemasyarakatan yang mampu mengidentifikasi suku maritim ini sangat minim. Padahal selain Bajo, dikenal juga suku Moken (perairan Bima, NTB), suku laut (kepualaun Riau-Lingga), Mandau, dan lainnya. Belum lagi suku dan masyarakat di sepanjang garis pantai. Minimnya kajian yang

intensif terhadap komunitas masyarakat maritim menjadikan semakin termarginalnya dari program pembangunan. Orientasi penelitian pada aspek kemasyarakatan maritim yang mampu mengungkap data dan informasi objektif, menjadi kebutuhan penting sebagai landasan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dalam pembangunan masyarakat khususnya melalui pemberdayaan masyarakat, pemahaman yang komperhensif ruang atau wilayah kehidupan menjadi sangat penting. Analisis wilayah secara partisipatif menjadi kebutuhan mutlak bagi para pengambil kebijakan pembangunan. Berbagai potensi fisik maupun manusia perlu dipahami terlebih dulu oleh masyarakat maritim. Perlu adanya pemahaman yang terintegrasi dalam kontek pengetahuan lokal masyarakat dengan ilmu pengetahuan modern. Diperlukan para komunikator yang mampu menjembatani kedua pengetahuan ini yang sering kali bertolak belakang.

ANALISIS POTENSI WILAYAH MARITIM UNTUK SDGs

Analisis potensi wilayah harus mampu mensinergikan ilmu pengetahuan modern dengan pengetahuan lokal masyarakat. Sinergisme tersebut diperlukan karena hampir sebagian besar masyarakat pesisir masih dalam tahapan tradisional. Sementara nilai tambah ekonomi dalam pembangunan memerlukan input teknologi dalam berbagai level. Namun demikian, orientasi ekonomi harus tetap memperhatikan aspek ekologis dan lingkungan (Idris, 2001). Dalam analisis potensi wilayah kemaritiman untuk SDGs, perlu kiranya informasi yang komperhensif antara keadaan fisik, sosial ekonomi budaya masyarakat, serta keadaan demografi yang berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Analisis dapat diterapkan pada wilayah secara mikro misalnya pada level desa maupun kecamatan.

Secara fisik kondisi wlayah pesisir dikendalikan oleh proses kepebisiran. Pengetahuan modern mengelompokkan proses kepebisiran dalam erosi dan deposisi marin sebagai bagian dari fenomena alamiah. Faktor dan variabel yang menentukan kedua proses tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Proses di Wilayah Pesisir Beserta Faktor dan Variabelnya

Proses Pesisir	Faktor	Variabel
Erosi Marin	Angin	Kecepatan, arah, durasi
	Faktor laut	Tinggi gelombang, panjang gelombang, periode gelombang, kecuraman gelombang, cepat rambat gelombang, kecepatan arus susur pantai, julat pasut, stabilitas muka laut
	Faktor pantai	Kecuraman gisik, konfigurasi garis pantai, kedalaman dasar laut, keterbukaan pantai, resistensi batuan pantai, pasokan sedimen
Deposisi Marin	Gelombang pecah	Arus menuju pantai, arus susur pantai, arus balik
	Ingsutan Litoral	Akresi lumpur, akresi pasir
	Pasang surut	Pola pasut, julat pasut, arus pasut
	Organisme laut	Pertumbuhan dan perkembangan terumbu

Sumber: Sunarto, 2004

Realitas kehidupan masyarakat pesisir tidak dapat lepas dari fenomena alam tersebut. Karakteristik budaya, sosial, dan ekonomi menjadi sangat tergantung dari proses alamiah kemaritiman tersebut. Kehidupan berinteraksi dengan alam pesisir secara turun menurun membentuk suatu budaya yang merupakan pengetahuan yang mengandung banyak kearifan lokal. Beberapa contoh kearifan lokal yang berkembang di masyarakat pesisir adalah Awik-awik Laut di Desa Tanjungluar Lombok Timur dan Sasi Laut Desa Pelauw serta Sasi Laut di Desa Haruku Pulau Haruku Maluku yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Antar Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir

	Awik-awik Laut Desa Tanjungluar	Sasi Laut Desa Pelauw	Sasi Laut Desa Haruku
Larangan adat	Terkait dengan upacara adat selamatan laut	Terkait dengan upacara adat buka dan tutup sasi	Terkait dengan upacara adat buka dan tutup sasi
Larangan eksploitasi	Alat tangkap yang merusak, ekosistem yang tidak stabil	Pembatasan alat tangkap	Pembatasan alat tangkap
Wilayah tangkapan	Wilayah dibedakan berdasarkan tingkatan teknologi alat tangkap	Wilayah yang diberi tanda sasi merupakan hak pemegang kontrak	Wilayah yang diberi tanda sasi merupakan hak desa
Sanksi	Fisik manusiawi, sosial	Materi berupa uang	Materi berupa uang
Kelembagaan	KPPL (Komite Pengelolaan Perikanan Laut) (tokoh masyarakat nelayan)	Pemegang hak kontrak atau pemenang lelang	Kewang (berdasarkan marga)
Legalitas lembaga	Aparat pemerintah kecamatan dan dinas Perikanan Kelautan, tokoh masyarakat nelayan setempat	Pemegang hak kontrak, raja negari, gereja atau takmir masjid	Raja negari (pimpinan adat)
Struktur lembaga	Kepala, sekretaris, bendahara, anggota yang terbagi dalam timbom dan tetilik, panitia penyelesaian kasus (timtus)	Tergantung pemegang kontrak	Kepala kewang, sakel, sekretaris, bendahara, anggota

Sumber: Purnomo, 2008

Dalam pengetahuan lokal tersebut dapat diidentifikasi makna dan nilai yang terkandung sebagai pedoman kehidupan masyarakat pesisir. Nilai tersebut cukup komprehensif dalam berbagai bidang yang meliputi aspek ruang, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Karakteristiknya dapat diidentifikasi sebagai berikut ini.

(1) Makna dari isi awig-awig laut dan sasi laut yang tidak tertulis serta berkembang di masyarakat nelayan terkandung nilai-nilai ekonomi, sosial politis, etika lingkungan, dan budaya.

(2) Nilai-nilai yang terkandung dalam awig-awig laut dan sasi laut bersama kelembagaan pelaksanaannya merupakan bentuk pranata budaya, yaitu suatu organisasi perilaku manusia dalam melaksanakan kehidupan yang terstruktur beserta sistem norma, tatakelakuannya, dan peralatannya dalam kehidupan masyarakat yang khas.

(3) Awig-awig laut dan sasi laut merupakan kearifan lokal berbentuk kesadaran kolektif yang menuntut partisipasi dan bersifat mengikat seluruh masyarakat nelayan lokal dalam menjaga kelestarian pesisir tempat mereka mencari penghidupan.

Selain aspek fisik dan sosial budaya, profil sumberdaya manusia (SDM) untuk pengembangan teknologi yang memacu perekonomian juga diperlukan untuk di analisis. Analisis demografi suatu wilayah dimaksudkan untuk memahami potensi sumberdaya manusia yang memungkinkan mampu menggerakkan ekonomi. Penggerak ekonomi didasarkan pada penguasaan berbagai level teknologi sebagai ciri dari peradaban modern menuju kesejahteraan. Pada umumnya SDM wilayah didasarkan pada jumlah penduduk per tahapan perkembangan perangkat manusia, SDM berdasarkan struktur keterampilan, dan SDM berdasarkan struktur buruh (Alkadri *et al.*, 1999).

SDM wilayah didasarkan pada jumlah penduduk per tahapan perkembangan perangkat manusia memiliki kepentingan dalam penyiapan kapasitas, kualifikasi, dan karakter SDM. Data komposisi dan pertumbuhan penduduk menurut umur SDM pada suatu wilayah menjadi dasar bagi

perencanaan pengembangan SDM. Tabel 3 menyajikan hubungan usia dengan program pengembangan SDM.

Tabel 3. Hubungan Usia Dengan Program Pengembangan SDM

No.	Usia	Program Pengembangan SDM
1	0 – 5 tahun	Pembesaran
2	6 – 11 tahun	Pendidikan dasar
3	12 – 17 tahun	Pengajaran
4	18 – 23 tahun	Pendidikan
5	24 – 29 tahun	Pelatihan
6	30 – 34 tahun	Penguatan
7	>34 tahun	Peningkatan

Sumber: Alkadri *et al.*, 1999

Pada kenyataannya sektor pendidikan di wilayah pesisir banyak yang belum mampu menyediakan program pengembangan SDM yang berjenjang berdasarkan umur. Masih sebagian besar wilayah pesisir hanya sebatas menyediakan program pengembangan SDM dalam pendidikan dasar. Jenjang lanjutan yang lebih spesifik pada bidang yang mengoptimalkan kemaritiman belum banyak diprogramkan.

SDM berdasarkan struktur keterampilan menjadi dasar bagi pengembangan SDM dalam pengembangan teknologi di wilayah bersangkutan. Nilai tambah ekonomi wilayah hanya dapat dipacu apabila tersedia berbagai SDM yang menggerakkan perekonomian wilayah tersebut. Kualifikasi SDM dapat dibedakan dalam hal berikut ini.

1. Peneliti (ilmuwan)
2. Pengembang (manager)
3. Pemasaran (marketing)
4. Teknisi (spesialis dan generalis)
5. Tukang / perajin
6. Pekerja (pembantu tukang)

Pada kenyataannya di sebagian besar wilayah pesisir struktur keterampilan SDM tersebut sangat langka. Struktur tukang maupun pekerja yang memiliki keterampilan umum paling banyak dijumpai. Pada struktur keterampilan ini mereka peroleh dari warisan orang tua dan kebiasaan yang mereka lakukan. Tidak

ada pelatihan khusus yang didapatkan. Bahkan mereka yang memiliki keahlian sebagai teknisi, keterampilannya didapatkan secara otodidak.

SDM berdasarkan struktur buruh atau kemampuan dalam sistem produksi merupakan kumpulan personal masyarakat yang dapat dikontrol untuk menjalankan suatu proses sistem produksi. Pada kenyataannya di sebagian besar wilayah pesisir struktur keterampilan SDM masih sebatas pengumpul, pembudidaya, dan prapengelolaan. Struktur tersebut masih memberikan kontribusi perekonomian yang subsisten.

PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU SEBAGAI DASAR RELASI POTENSI ANTAR WILAYAH MARITIM DALAM SDGs

Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan suatu daerah dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya yang ada secara optimal dengan menggerakkan ekonomi dan fasilitas pelayanan serta perlindungan lingkungan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat (Witoelar, 2000). Pengembangan wilayah terpadu merupakan satu kesatuan utuh pembangunan yang menimbulkan sinergisme antar wilayah dan antar sektor (Dahuri *et al.*, 1996; Sumampouw dalam Rais *et al.*, 2004). Sinergisme wilayah dan sektor adalah pertumbuhan positif secara bersama yang menuju pada capaian kesejahteraan bagi semua wilayah dari berbagai sektor.

Strategi pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik dan permasalahan wilayah pesisir dan pulau kecil dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenjang. Penjenjangan ini memiliki arti penting sebagai upaya untuk pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah dalam kesatuan pengembangannya. Strategi tersebut meliputi pengembangan wilayah secara mikro (desa / kecamatan), meso (antar desa / kecamatan), dan makro (antar daerah / kawasan). Hal yang perlu dikembangkan pada masing-masing skala adalah sebagai berikut (Witoelar, 2000).

1. Pengembangan mikro : dikembangkan berdasarkan potensi desa/kecamatan, pembinaan produksi usaha penangkapan dan budidaya laut, perlindungan

lingkungan, peningkatan nilai tambah, penguatan kegiatan jasa dan perdagangan.

2. Pengembangan meso : penguatan keterkaitan antar desa / kecamatan atau antar sentra produksi, pengembangan industri kecil dan menengah serta jasa, pengembangan fasilitas pelayanan transportasi jasa dan sosial, pengembangan perdagangan, pengembangan spesialisasi produksi, pelibatan investor, dan perlu pelabuhan atau terminal outlet.
3. Pengembangan makro : penguatan keterkaitan antar sentra industri, pemberian insentif, spesialisasi kawasan, dukungan sarana prasarana, pengembangan pusat-pusat pelayanan, peran serta investor.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa diperlukan kajian objektif dan komunikator yang menjembatani pengetahuan modern dan pengetahuan lokal yang mampu menggali potensi wilayah maritim secara komprehensif sebagai landasan SDGs.. Pada perencanaan wilayah level mikro yaitu desa atau kecamatan, informasi objektif karakteristik fisik maritim, budaya sosial ekonomi spesifik masyarakat, dan struktur demografi yang mendukung keterampilan teknologi untuk pembangkit perekonomian sangat diperlukan. Perencanaan terpadu yang berjenjang untuk pengembangan wilayah maritim mutlak untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, Riyadi, D., S., Muchdie, Siswanto S., Fathoni M., 1999. *Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah*. Direktorat Kebijakan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta.
- Dahuri, R., Rais., J., Ginting S., P., Stepu M, J., 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramitra, Jakarta
- Idris, Irwandi, 2001. Dilema Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Makalah seminar Dilema Penerapan Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berwawasan Lingkungan*. Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

- Kamiso, H., N., 2000. Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Kelembagaan dalam Eksplorasi Sumberdaya Wilayah Pantai dan Laut Menuju Otonomi Daerah. *Makalah seminar nasional "Mencari Paradigma Baru dalam Pengelolaan Ekosistem Pantai dan Pulau-Pulau Kecil dalam Konteks Negara Kepulauan"*, Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.
- Kardono, P., Hartono, Suprajaka, (eds) 2015. *Paradigma Geomaritim, Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dalam Prespektif Geografi*. Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI), Bogor.
- Purnomo, N.H., 2008. Kajian Kearifan Lokal Sebagai Pranata Budaya Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir. *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 1/ No. 2, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Hal 67-74.
- Sumampouw M., 2004. Perencanaan Darat Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif. Dalam *Menata Ruang Laut Terpadu*, Pradnya Paramitra, Jakarta
- Sunarto, 2004. Perubahan Fenomena Geomorfik Daerah Kepesisiran di Sekeliling Gunungapi Muria Jawa Tengah (Kajian Paleogeomorfologi). *Disertasi (tidak dipublikasikan)*. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Witoelar, E., 2000. Pengelolaan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Pendekatan Pengembangan Wilayah. *Makalah seminar nasional "Mencari Paradigma Baru dalam Pengelolaan Ekosistem Pantai dan Pulau-Pulau Kecil dalam Konteks Negara Kepulauan"*, Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.